



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyesuaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, mempercepat perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan serta menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Tahun 2019-2024 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);

Memperhatikan : Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2025-2029.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
4. Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan, selanjutnya disingkat RAD-KSB adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi terbarukan, meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan, dan mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.
5. Tim Pelaksana Daerah adalah tim yang ditetapkan oleh bupati untuk melaksanakan rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.
6. Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran kelapa sawit.

7. Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa perkebunan kelapa sawit.
8. Pekebun adalah perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu (kurang dari 25 hektar).
9. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
10. Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil*), selanjutnya disebut ISPO adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

RAD-KSB tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan Kelapa Sawit berkelanjutan di Daerah yang lebih terarah dan terintegrasi dalam pelaksanaannya, serta mendapat dukungan para pemangku kepentingan.

Pasal 3

RAD-KSB tahun 2025–2029 bertujuan :

- a. untuk meningkatkan pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan yang lebih terarah dan terintegrasi; dan
- b. untuk mempercepat proses penataan dan penertiban Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang memperhatikan aspek lingkungan, ekonomi dan sosial.

Pasal 4

Sasaran RAD-KSB tahun 2025–2029 adalah :

- a. meningkatnya jumlah Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang memperoleh sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan dan mempersiapkan petani kelapa sawit beserta kelembagaannya untuk memperoleh sertifikasi tersebut;
- b. meningkatnya produktivitas hasil Perkebunan Kelapa Sawit dan mengoptimalkan kapasitas pabrik kelapa sawit;
- c. peningkatan daya beli dan daya tampung pabrik kelapa sawit terhadap hasil Perkebunan Kelapa Sawit rakyat yang kelembagaannya sudah dimitrakan;

- d. terwujudnya industri kelapa sawit tanpa limbah melalui pemanfaatan produk turunan baik sebagai sumber hara maupun sumber energi terbarukan;
- e. diversifikasi sumber pendapatan petani, terutama yang berbasis Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;
- f. peningkatan kapasitas petani maupun kelembagaannya, baik dalam kultur teknis maupun manajerial usaha taninya;
- g. tersedianya peraturan dan kebijakan Daerah yang kondusif bagi pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit.

BAB III

RENCANA AKSI DAERAH

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Pasal 5

- (1) RAD-KSB tahun 2025–2029 dituangkan bentuk matriks program dan kegiatan meliputi 5 (lima) komponen yaitu:
 - a. penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur;
 - b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas Pekebun;
 - c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 - d. tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
 - e. dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan peningkatan produk kelapa sawit.
- (2) Rincian RAD-KSB tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan RAD-KSB dilakukan secara koordinatif oleh Tim Pelaksana Daerah yang terdiri dari instansi Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait, instansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, instansi vertikal, mitra pembangunan/organisasi non pemerintahan, pelaku usaha, dan akademisi;
- (2) RAD-KSB dilaksanakan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pembentukan Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati;

- (4) Untuk membantu Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Sekretariat Tim Pelaksana Daerah yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perkebunan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan dalam pelaksanaan RAD KSB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendorong efektivitas capaian target RAD-KSB dilakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RAD-KSB berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
- (3) Tim Pelaksana Daerah melaporkan hasil pelaksanaan capaian RAD-KSB kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 6 Agustus 2025

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

Diundangkan di Krui
pada tanggal 6 Agustus 2025

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

ttd

TEDI ZADMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025 NOMOR 554



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
 NOMOR : 19 TAHUN 2025
 TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
 BERKELANJUTAN TAHUN 2025-2029

MATRIK RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN (RAD-KSB) KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025-2029

Kegiatan (Renstra OPD)			Sub-Kegiatan			Indikator Keluaran (Renstra)			Waktu Pelaksanaan					OPD Pelaksana	OPD/ Mitra Penunjang		Pembiayaan
									2025	2026	2027	2028	2029				
A. PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI, DAN INFRASTRUKTUR																	
1 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Kode Nomenklatur 2 20 02)																	
1	1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten Pesisir Barat	1	1	1	Pendataan luas areal perkebunan kelapa sawit	Dokumen basis data luas areal perkebunan sawit							Diskominfotiksan Kab. Pesibar	1. DKPP Kab. Pesibar 2. DLH Kab. Pesibar 3. BPS Kab. Pesibar 4. Bappelitbangda Kab. Pesibar 5. Perusahaan Kelapa Sawit di Kab.Pesibar 6. Pelaku Usaha	APBN/APBD	
			1	1	2	Pendataan jumlah pekebun	Dokumen basis data jumlah pekebun										
			1	1	3	Pendataan produktivitas kelapa sawit	Dokumen basis data produktivitas kelapa sawit										
			1	1	4	Pendataan penggunaan pupuk dan pestisida	Dokumen basis data penggunaan pupuk dan pestisida										
			1	1	5	Pendataan emisi gas rumah kaca dari perkebunan kelapa sawit	Dokumen basis data emisi gas rumah kaca dari perkebunan kelapa sawit										
1	2	Pengembangan sistem informasi geografis (SIG) perkebunan kelapa sawit	1	2	1	Pemetaan areal perkebunan kelapa sawit	Jumlah dokumen sistem informasi geografis (SIG) perkebunan kelapa sawit yang informatif							DKPP Kab. Pesibar	1. Diskominfotiksan Kab. Pesibar 2. DLH Kab. Pesibar 3. BPS Kab. Pesibar 4. Bappelitbangda Kab. Pesibar 5. Perusahaan Kelapa Sawit di Kab. Pesibar 6. Pelaku Usaha	APBN/APBD	
			1	2	2	Pemetaan tutupan lahan	Jumlah dokumen sistem informasi geografis (SIG) tutupan lahan yang informatif										
			1	2	3	Pemetaan infrastruktur perkebunan kelapa sawit	Jumlah dokumen sistem informasi geografis (SIG) infrastruktur perkebunan kelapa sawit yang informatif										
			1	2	4	Pemetaan potensi dan tantangan pengembangan perkebunan kelapa sawit	Jumlah dokumen sistem informasi geografis (SIG) potensi dan perkembangan perkebunan kelapa sawit yang informatif										
1	3	Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi (Monev) perkebunan kelapa sawit	1	3	1	Penetapan indikator kinerja perkebunan kelapa sawit	Jumlah dokumen penetapan indikator kinerja perkebunan kelapa sawit yang efektif							DKPP Kab. Pesibar	1. Diskominfotiksan Kab. Pesibar 2. DLH Kab. Pesibar 3. BPS Kab. Pesibar 4. Bappelitbangda Kab. Pesibar 5. Perusahaan Kelapa Sawit di Kab. Pesibar 6. Pelaku Usaha	APBN/APBD	
			1	3	2	Pengumpulan data monev perkebunan kelapa sawit	Jumlah dokumen data perkebunan kelapa sawit yang efektif										
			1	3	3	Analisis data monev perkebunan kelapa sawit	Jumlah laporan analisis data perkebunan kelapa sawit yang efektif										
			1	3	4	Penyusunan laporan monev perkebunan kelapa sawit	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi (Monev) perkebunan kelapa sawit yang efektif										
1	4	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	4	1	Fasilitasi pembentukan Forum Komunikasi Kelapa Sawit di tingkat kabupaten	Berita Acara Forum Komunikasi Kelapa Sawit di tingkat kabupaten yang terbentuk							DKPP Kab. Pesibar	1. Diskominfotiksan Kab. Pesibar 2. DLH Kab. Pesibar 3. BPS Kab. Pesibar	APBN/APBD	
			1	4	2	Fasilitasi penyusunan rencana kerja Forum Komunikasi Kelapa Sawit	Dokumen rencana kerja Forum Komunikasi Kelapa Sawit yang disusun										
			1	4	3	Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Kelapa Sawit	Jumlah kegiatan forum komunikasi kelapa sawit yang dilaksanakan										

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		2 4 2	Pembangunan gudang penyimpanan kelapa sawit	Jumlah gudang penyimpanan kelapa sawit yang dibangun							2.	DLH Kab. Pesibar		
		2 4 3	Pembangunan dermaga pengangkutan kelapa sawit	Jumlah dermaga pengangkutan kelapa sawit yang dibangun							3.	BPS Kab. Pesibar		
		2 4 4	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pasca panen (misalnya, modernisasi peralatan, pembangunan laboratorium)	Jumlah sarana dan prasarana pasca panen (modernisasi peralatan, pembangunan laboratorium) yang ditingkatkan kualitasnya							4.	Bappelitbangda Kab. Pesibar		
											5.	Perusahaan Kelapa Sawit di Kab. Pesibar		
3 Program Penyelenggaraan Jalan (Kode Nomenklatur 1 03 10)														
3	1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten di sentra Perkebunan Kelapa sawit		3 1 1	Rehabilitasi jembatan di sentra perkebunan kelapa sawit	Jumlah jembatan yang direhabilitasi						Dinas PUPR Kab. Pesibar	1. DKPP Kab. Pesibar 2. DLH Kab. Pesibar 3. BPS Kab. Pesibar 4. Bappelitbangda Kab. Pesibar 5. Perusahaan Kelapa Sawit di Kab. Pesibar	APBN/APBD
				3 1 2	Rehabilitasi/konstruksi jalan di sentra perkebunan kelapa sawit	Panjang jalan (Km) yang direhabilitasi/rekonstruksi								
B. PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PERKEBUN														
4 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Kode Nomenklatur 3 27 02)														
4	1	Pengawasan peredaran sarana pertanian		4 1 1	Manajemen penerbitan sertifikat untuk bibit.	Jumlah bibit yang diawasi dan disertifikasi						DKPP Kab. Pesibar	1. Bappelitbangda Kab. Pesibar 2. UPTD KPH Kab. Pesibar 3. Perusahaan Benih 4. Produsen Benih 5. Pelaku Usaha	APBN/APBD
				4 1 2	Evaluasi kelayakan kebun sumber benih tanaman perkebunan	Jumlah kebun sumber benih yang dievaluasi								
				4 1 3	Penilaian varietas tanaman perkebunan sawit	Jumlah lokasi sebaran varietas yang telah dilepas/unggul lokal, identifikasi calon varietas unggul								
				4 1 4	Penertiban izin usaha kecambah kelapa sawit	Jumlah izin usaha sumber benih yang ditertibkan								
				4 1 5	Sosialisasi dan pengembangan kemitraan perbenihan antara penangkar dan perusahaan sumber benih	Jumlah sosialisasi dan pengembangan kemitraan perbenihan								1. Perusahaan Benih 2. Produsen Benih 3. Pelaku Usaha

			4	1	6	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih perkebunan : a. Peremajaan kebun kelapa sawit b. Diversifikasi tanaman kelapa sawit di perkebunan rakyat c. Pendukung kegiatan peremajaan perkebunan	Dokumen data pengawasan mutu, penyedian dan peredaran benih perkebunan kelapa sawit							DKPP Kab. Pesibar	1. Bappelitbangda Kab. Pesibar 2. Perusahaan Benih 3. Produsen Benih 4. Pelaku Usaha	APBN/ APBD
			4	1	7	Pendataan peredaran benih di Kabupaten Pesisir Barat	Jumlah laporan data peredaran benih								1. Bappelitbangda Kab. Pesibar 2. Perusahaan Benih 3. Produsen Benih 4. Pelaku Usaha	APBN/ APBD
4	2	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya di Kabupaten Pesisir Barat	4	2	1	Sertifikasi unit usaha pembibitan kelapa sawit	Jumlah izin usaha bidang pembibitan kelapa sawit							DKPP Kab. Pesibar	1. DPMPTSP 2. Pelaku Usaha	APBN/ APBD
5 Program Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun																
5	1	Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun	5	1	1	Sosialisasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)	Jumlah sosialisasi PSR							DKPP Kab. Pesibar	1. BDPKS 2. Bappelitbangda Kab. Pesibar 3. UPTD KPH Kab. Pesibar 4. Penyuluh Pertanian 5. Pelaku Usaha	APBN/ APBD
			5	1	2	Pendampingan pemenuhan persyaratan PSR	Jumlah Pendampingan Pemenuhan persyaratan PSR									
			5	1	3	Pelaksanaan PSR	Jumlah pelaksanaan PSR									
			5	1	4	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PSR	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan PSR									
6 Program Penyuluhan Pertanian (Kode Nomenklatur 3 27 07)																
6	1	Pengembangan ketenagaan penyuluhan pertanian	6	1	1	Kerjasama pengembangan kompetensi penyuluh pertanian swadaya dan swasta	Jumlah kelembagaan penyuluhan yang ditingkatkan kompetensinya							DKPP Kab. Pesibar	1. DPMPTSP Kab. Pesibar 2. Bappelitbangda Kab. Pesibar 3. Penyuluh Pertanian 4. Pelaku Usaha	APBN/ APBD
			6	1	2	Fasilitasi peyelenggaraan sertifikasi kompetensi dibidang perkebunan kelapa sawit	Jumlah penyuluh yang kompeten dibidang perkebunan kelapa sawit							DKPP Kab. Pesibar	1. LSP 2. DPMPTSP 3. Bappelitbangda Kab. Pesibar 4. Penyuluh Pertanian 5. Pelaku Usaha	
			6	1	3	Pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan penentuan rendemen swadaya kelapa sawit	Jumlah penyuluhan dan pelatihan penentuan rendemen swadaya kelapa sawit							DKPP Kab. Pesibar	1. Bappelitbangda Kab. Pesibar 2. Penyuluh Pertanian 3. Pelaku Usaha	
6	2	Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian	6	2	1	Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian							DKPP Kab. Pesibar	1. DPMPTSP Kab. Pesibar 2. DISKOPUKMDAG Kab. Pesibar 3. Bappelitbangda Kab. Pesibar 4. DT2KP Kab. Pesibar 5. Penyuluh Pertanian 6. Pelaku Usaha	APBN/ APBD
			6	2	2	Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani : Pelatihan Fasilitator Daerah (FASDA) I, II, dan III bagi ASN, Penyuluh/ pendamping, pengurus KUD/GAPOKTAN /POKTAN, tokoh masyarakat	Jumlah pelatihan FASDA I, II, dan III bagi ASN, Penyuluh/ pendamping, Pengurus KUD/GAPOKTAN/POKTAN, Tokoh masyarakat									
			6	2	3	Pelatihan budi daya yang baik (<i>Good Agriculture Practices /GAP</i>) kelapa sawit	Jumlah pekebun yang mengikuti pelatihan GAP kelapa sawit									
			6	2	4	Pelatihan penumbuhan kebersamaan (Dinamika Kelompok)	Jumlah pekebun yang mengikuti pelatihan Dinamika Kelompok									

6	3	Pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan	6	3	1	Pembentukan dan penguatan kelembagaan koperasi petani dalam rangka upaya menuju korporasi perkebunan kelapa sawit	Jumlah kelembagaan koperasi petani dalam rangka upaya menuju korporasi perkebunan kelapa sawit									DKPP Kab. Pesibar	1. DPMPTSP Kab. Pesibar 2. DISKOPUKMDAG Kab. Pesibar 3. Bappelitbangda Kab. Pesibar 4. DT2KP Kab. Pesibar 5. Penyuluh Pertanian 6. Pelaku Usaha	APBN/ APBD
			6	3	2	Bimbingan teknis penanganan pasca panen dan pengolahan hasil komoditi perkebunan	Jumlah penyelenggaraan bimbingan teknis penanganan pascapanen dan pengolahan hasil komoditi sawit											
			6	3	3	Pengembangan kelembagaan pengolahan dan pemasaran produk olahan komoditi perkebunan.	Jumlah kelembagaan pengolahan dan pemasaran produk olahan komoditi sawit											
			6	3	4	Sosialisasi standarisasi, uji mutu dan sertifikasi mutu produk komoditi perkebunan	Jumlah penyelenggaraan sosialisasi standarisasi, uji mutu dan sertifikasi mutu produk komoditi kelapa sawit (rendemen swadaya)											
			6	3	5	Registrasi produk komoditi perkebunan di Kabupaten Pesisir Barat	Jumlah produk komoditi sawit yang teregistrasi											
			6	3	6	Fasilitasi uji mutu dan sertifikasi mutu produk komoditi perkebunan	Jumlah kelembagaan yang difasilitasi uji mutu dan sertifikasi mutu produk komoditi kelapa sawit											
			6	3	7	Temu bisnis/partisipasi pada expo/pameran produk komoditi perkebunan	Jumlah penyelenggaraan temu bisnis/partisipasi pada expo/pameran produk komoditi kelapa sawit											
			6	3	8	Fasilitasi kemitraan permodalan dan pemasaran produk komoditi perkebunan.	Jumlah kelembagaan yang terfasilitasi kemitraan permodalan dan pemasaran produk komoditi kelapa sawit											
			6	3	9	Sosialisasi penetapan dan penerapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit dan kemitraan kelembagaan pekebun dengan perusahaan perkebunan mitra.	Jumlah sosialisasi penetapan dan penerapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit dan kemitraan kelembagaan pekebun dengan perusahaan perkebunan mitra.											
			6	3	10	Pelaksanaan rapat penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun	Terselenggaranya pelaksanaan rapat penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun											
			6	3	11	Penguatan kelembagaan dan kapasitas pekebun yang bermitra dengan perusahaan perkebunan mitra	Jumlah kelembagaan dan pekebun yang bermitra dengan perusahaan perkebunan mitra											
			6	3	12	Akselerasi kemitraan kelembagaan pekebun kelapa sawit swadaya dengan perusahaan perkebunan mitra	Jumlah akselerasi kemitraan kelembagaan pekebun kelapa sawit swadaya dengan perusahaan perkebunan mitra											
			6	3	13	Pembinaan dan pengawasan penetapan dan penerapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan penetapan dan penerapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun											
			6	3	14	Fasilitasi alat pascapanen pengolahan (hilirisasi) dan pemasaran hasil perkebunan	Jumlah kelembagaan yang terfasilitasi alat pascapanen dan pemasaran hasil											
			6	3	15	Pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani pekebun	Jumlah Korporasi petani pekebun											
			6	3	16	Pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun	Jumlah kemitraan perusahaan-pekebun yang dievaluasi											

7Program Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Kabupaten													
7	1	Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah kabupaten (Kode Nomenklatur 3 30 04 2.03)	711	Koordinasi dan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk	Jumlah laporan koordinasi dan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk						DKPP Kab. Pesibar	1. DISKOPUKMDAG Kab. Pesibar 2. DT2KP Kab. Pesibar 3. DPMPTSP Kab. Pesibar 4. Perbankan 5. Penyuluh Pertanian 6. Pelaku Usaha	APBN/APBD
			712	Koordinasi dan pengawasan penyaluran dan penggunaan pestisida	Jumlah laporan koordinasi dan pengawasan penyaluran dan penggunaan pestisida								
			713	Peningkatan sosialisasi akses pendanaan dari perbankan/ lembaga keuangan lainnya	Jumlah penerima akses pendanaan dari perbankan/ lembaga keuangan lainnya								
			714	Pengembangan dan Penguatan Ekonomi Petani Berbasis Korporasi	Jumlah Korporasi petani yang mendapatkan Penguatan Ekonomi Petani								
C. PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN													
8Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kode Nomenklatur 2 11 04)													
8	1	Pemantauan dan evaluasi pengelolaan keanekaragaman hayati di areal perkebunan secara berkelanjutan	811	Pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan pengelolaan keanekaragaman hayati penghasil kelapa sawit	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan pengelolaan keanekaragaman hayati penghasil kelapa sawit						DLH Kab. Pesibar	1. DKPP Kab. Pesibar 2. DT2KP Kab. Pesibar 3. DPMPTSP Kab. Pesibar 4. Bappelitbangda Kab. Pesibar 5. Kantor Pertanahan Kab. Pesibar 6. UPTD KPH Kab. Pesibar 7. BUMD/Perusahaan Kelapa Sawit di Kab. Pesibar 8. Pelaku Usaha	APBN/APBD
			812	Pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan pengelolaan keanekaragaman hayati yang berada di dalam areal usaha perkebunan	Jumlah laporan perusahaan yang telah mengelola keanekaragaman hayati yang berada di dalam areal usaha perkebunan								
8	2	Sosialisasi tentang KEE dan kawasan lindung untuk pihak terkait penghasil kelapa sawit	831	Sosialisasi tentang KEE dan kawasan lindung untuk pihak terkait penghasil kelapa sawit	Jumlah sosialisasi tentang KEE dan kawasan lindung untuk pemerintah kabupaten/kota penghasil kelapa sawit						DLH Kab. Pesibar	1. DKPP Kab. Pesibar 2. DT2KP Kab. Pesibar 3. DPMPTSP Kab. Pesibar 4. Bappelitbangda Kab. Pesibar 5. Kantor Pertanahan Kab. Pesibar 6. UPTD KPH Kab. Pesibar 7. BUMD/Perusahaan Kelapa Sawit di Kab. Pesibar 8. Pelaku Usaha	APBN/APBD
8	3	Peningkatan peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS)	831	Peningkatan peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Jumlah peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi DAS						DLH Kab. Pesibar	1. DKPP Kab. Pesibar 2. DT2KP Kab. Pesibar 3. DPMPTSP Kab. Pesibar 4. Bappelitbangda Kab. Pesibar 5. Kantor Pertanahan Kab. Pesibar 6. UPTD KPH Kab. Pesibar 7. BUMD/Perusahaan Kelapa Sawit di Kab. Pesibar 8. Pelaku Usaha	APBN/APBD
			832	Pembuatan embung dan rorak di kebun sawit untuk ketersediaan air	Jumlah pembuatan embung dan rorak di kebun sawit untuk ketersediaan air								
			833	Pelatihan dan pembuatan biopori di kebun sawit untuk konservasi air	Jumlah pelatihan dan pembuatan biopori di kebun sawit untuk konservasi air								
9Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Kode Nomenklatur 3 27 05)													
9	1	Dukungan sarana prasarana untuk pekebun dalam penerapan Pembukaan lahan Tanpa Bakar (PLTB)	911	Fasilitasi sarana prasarana untuk pekebun yang menerapkan PLTB di kabupaten/kota penghasil kelapa sawit yang rawan kebakaran secara berkelanjutan	Jumlah pekebuna yang terfasilitasi sarana prasarana untuk pekebun yang menerapkan PLTB di kabupaten/kota penghasil kelapa sawit yang rawan kebakaran secara berkelanjutan						DKPP Kab. Pesibar	1. DLH Kab. Pesibar 2. DT2KP Kab. Pesibar 3. DPMPTSP Kab. Pesibar 4. Bappelitbangda Kab. Pesibar 5. Kantor Pertanahan Kab. Pesibar 6. UPTD KPH Kab. Pesibar 7. BUMD/Perusahaan Kelapa Sawit di Kab. Pesibar 8. Pelaku Usaha	APBN/APBD

9	2	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun	9	2	1	Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun							DKPP Kab. Pesibar	1. DLH Kab. Pesibar 2. DT2KP Kab. Pesibar 3. DPMPTSP Kab. Pesibar 4. Bappelitbangda Kab. Pesibar 5. Kantor Pertanahan Kab. Pesibar 6. UPTD KPH Kab. Pesibar 7. BUMD/Perusahaan Kelapa Sawit di Kab. Pesibar 8. Pelaku Usaha	APBN/APBD
9	3	Peningkatan kerja sama Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang terletak disekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun	9	3	1	Pembentukan KTPA di sekitar perkebunan kelapa sawit	Jumlah KTPA yang terbentuk di sekitar perkebunan kelapa sawit							DKPP Kab. Pesibar	1. DLH Kab. Pesibar 2. DT2KP Kab. Pesibar 3. DPMPTSP Kab. Pesibar 4. Bappelitbangda Kab. Pesibar 5. Kantor Pertanahan Kab. Pesibar 6. UPTD KPH Kab. Pesibar 7. BUMD/Perusahaan Kelapa Sawit di Kab. Pesibar 8. Pelaku Usaha	APBN/APBD
			9	3	2	Fasilitasi kerja sama perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan KTPA yang terletak disekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun	Jumlah kerja sama perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan KTPA yang terletak disekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun									
9	4	Tindak lanjut hasil pemantauan titik api (hotspot) kebakaran lahan dan kebun	9	4	1	Terlaksananya tindaklanjut hasil pemantauan titik api (hotspot) kebakaran lahan dan kebun secara berkala	Jumlah tindak lanjut hasil pemantauan titik api (hotspot) kebakaran lahan dan kebun secara berkala							DKPP Kab. Pesibar	1. DLH Kab. Pesibar 2. DT2KP Kab. Pesibar 3. DPMPTSP Kab. Pesibar 4. Bappelitbangda Kab. Pesibar 5. Kantor Pertanahan Kab. Pesibar 6. UPTD KPH Kab. Pesibar 7. BUMD/Perusahaan Kelapa Sawit di Kab. Pesibar 8. Pelaku Usaha	APBN/APBD
9	5	Penyusunan Peraturan terkait KTPA	9	5	1	Penyusunan peraturan terkait KTPA	Jumlah dokumen peraturan terkait KTPA							DKPP Kab. Pesibar	1. DLH Kab. Pesibar 2. DT2KP Kab. Pesibar 3. DPMPTSP Kab. Pesibar 4. Bappelitbangda Kab. Pesibar 5. Kantor Pertanahan Kab. Pesibar 6. UPTD KPH Kab. Pesibar 7. BUMD/Perusahaan Kelapa Sawit di Kab. Pesibar 8. Pelaku Usaha	APBN/APBD
9	6	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten Pesisir Barat	9	6	1	Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang dikendalikan							DKPP Kab. Pesibar	1. DLH Kab. Pesibar 2. DT2KP Kab. Pesibar 3. DPMPTSP Kab. Pesibar 4. Bappelitbangda Kab. Pesibar 5. Kantor Pertanahan Kab. Pesibar 6. UPTD KPH Kab. Pesibar 7. BUMD/Perusahaan Kelapa Sawit di Kab. Pesibar 8. Pelaku Usaha	APBN/APBD
			9	6	2	Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Jumlah area terdampak perubahan iklim tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang ditangani									
			9	6	3	Penanggulangan pascabencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan									

10 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Kode Nomenklatur 2 11 03)												
10 1	Inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK pada perkebunan secara periodik	10 1 1	Inventarisasi emisi GRK, baseline, dan target penurunan emisi pada perkebunan secara periodik	Jumlah laporan inventarisasi emisi GRK, baseline, dan target penurunan emisi pada perkebunan secara periodik						DLH Kab. Pesibar	1. DKPP Kab. Pesibar 2. DT2KP Kab. Pesibar 3. DPMPTSP Kab. Pesibar 4. Bappelitbangda Kab. Pesibar 5. Kantor Pertanahan Kab. Pesibar 6. UPTD KPH Kab. Pesibar 7. BUMD/Perusahaan Kelapa Sawit di Kab. Pesibar 8. Pelaku Usaha	APBN/APBD
10 2	Penyusunan rencana aksi mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi di perkebunan kelapa sawit	10 2 1	Penyusunan rencana aksi mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi di perkebunan kelapa sawit	Jumlah dokumen rencana aksi mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi dari perkebunan sawit						DLH Kab. Pesibar	1. DKPP Kab. Pesibar 2. DT2KP Kab. Pesibar 3. DPMPTSP Kab. Pesibar 4. Bappelitbangda Kab. Pesibar 5. Kantor Pertanahan Kab. Pesibar 6. UPTD KPH Kab. Pesibar 7. BUMD/Perusahaan Kelapa Sawit di Kab. Pesibar 8. Pelaku Usaha	APBN/APBD
10 3	Pelaksanaan aksi mitigasi, pemantauan dan verifikasi penurunan emisi GRK di perkebunan sawit	10 3 1	Pelaksanaan aksi mitigasi, pemantauan dan verifikasi penurunan emisi GRK di perkebunan sawit	Jumlah laporan potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit						DLH Kab. Pesibar	1. DKPP Kab. Pesibar 2. DT2KP Kab. Pesibar 3. DPMPTSP Kab. Pesibar 4. Bappelitbangda Kab. Pesibar 5. Kantor Pertanahan Kab. Pesibar 6. UPTD KPH Kab. Pesibar 7. BUMD/Perusahaan Kelapa Sawit di Kab. Pesibar 8. Pelaku Usaha	APBN/APBD
10 4	Pemantauan <i>Monitoring, Reporting, and Verification</i> (MRV) potensi penurunan emisi GRK di perkebunan dan pabrik kelapa sawit	10 4 1	Pemantauan MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan dan pabrik kelapa sawit	Jumlah laporan hasil MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan dan pabrik kelapa sawit di kabupaten/kota						DLH Kab. Pesibar	1. DKPP Kab. Pesibar 2. DT2KP Kab. Pesibar 3. DPMPTSP Kab. Pesibar 4. Bappelitbangda Kab. Pesibar 5. Kantor Pertanahan Kab. Pesibar 6. UPTD KPH Kab. Pesibar 7. BUMD/Perusahaan Kelapa Sawit di Kab. Pesibar 8. Pelaku Usaha	APBN/APBD
		10 4 2	Verifikasi penurunan emisi di perkebunan dan pabrik kelapa sawit	Jumlah laporan verifikasi penurunan emisi di perkebunan dan pabrik kelapa sawit								
10 5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penurunan emisi GRK	10 5 1	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penurunan emisi GRK	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi melakukan pengukuran emisi GRK						DLH Kab. Pesibar	1. DKPP Kab. Pesibar 2. DT2KP Kab. Pesibar 3. DPMPTSP Kab. Pesibar 4. Bappelitbangda Kab. Pesibar 5. Kantor Pertanahan Kab. Pesibar 6. UPTD KPH Kab. Pesibar 7. BUMD/Perusahaan Kelapa Sawit di Kab. Pesibar 8. Pelaku Usaha	APBN/APBD
11 Program Rehabilitasi Kawasan Hutan dan Lahan Kritis												
11 1	Identifikasi lahan kritis maupun status kepemilikan di dalam dan atau di luar kawasan hutan	11 1 1	Identifikasi lahan kritis maupun status kepemilikan di dalam dan atau di luar kawasan hutan	Jumlah dokumen identifikasi lahan kritis dan status kepemilikan di dalam dan atau di luar kawasan hutan yang diperbaharui secara berkala						DKPP Kab. Pesibar	1. DLH Kab. Pesibar 2. DT2KP Kab. Pesibar 3. DPMPTSP Kab. Pesibar 4. Bappelitbangda Kab. Pesibar 5. Kantor Pertanahan Kab. Pesibar 6. UPTD KPH Kab. Pesibar 7. BUMD/Perusahaan Kelapa Sawit di Kab. Pesibar 8. Pelaku Usaha	APBN/APBD

11	2	Penyusunan regulasi dan petunjuk teknis terkait peningkatan efektifitas pengelolaan lahan kritis	11	2	1	Penyusunan regulasi dan petunjuk teknis terkait peningkatan efektifitas pengelolaan lahan kritis	Jumlah dokumen regulasi dan petunjuk teknis terkait pemberian peluang pengelolaan lahan kritis							DKPP Kab. Pesibar	1. DLH Kab. Pesibar 2. DT2KP Kab. Pesibar 3. DPMPTSP Kab. Pesibar 4. Bappelitbangda Kab. Pesibar 5. Kantor Pertanahan Kab. Pesibar 6. UPTD KPH Kab. Pesibar 7. BUMD/Perusahaan Kelapa Sawit di Kab. Pesibar 8. Pelaku Usaha	APBN/APBD
11	3	Pembangunan data dasar pertanahan dan lahan kritis di perkebunan kelapa sawit	11	3	1	Pembangunan data dasar pertanahan dan lahan kritis di perkebunan kelapa sawit	Jumlah laporan data dasar pertanahan dan lahan kritis disektor perkebunan kelapa sawit							DKPP Kab. Pesibar	1. DLH Kab. Pesibar 2. DT2KP Kab. Pesibar 3. DPMPTSP Kab. Pesibar 4. Bappelitbangda Kab. Pesibar 5. Kantor Pertanahan Kab. Pesibar 6. UPTD KPH Kab. Pesibar 7. BUMD/Perusahaan Kelapa Sawit di Kab. Pesibar 8. Pelaku Usaha	APBN/APBD
11	4	Kajian sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan	11	4	1	Kajian sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan	Jumlah dokumen kajian tentang sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan							DKPP Kab. Pesibar	1. DLH Kab. Pesibar 2. DT2KP Kab. Pesibar 3. DPMPTSP Kab. Pesibar 4. Bappelitbangda Kab. Pesibar 5. Kantor Pertanahan Kab. Pesibar 6. UPTD KPH Kab. Pesibar 7. BUMD/Perusahaan Kelapa Sawit di Kab. Pesibar 8. Pelaku Usaha	APBN/APBD
12 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan (Kode Nomenklatur 3 29 05)																
12	1	Kajian studi kelayakan tentang pemanfaatan limbah padat dan limbah cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan	12	1	1	Kajian studi kelayakan tentang pemanfaatan limbah padat dan limbah cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan	Jumlah dokumen kajian dan berbagai pengetahuan tentang tata cara pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk berbagai kepentingan							DKPP Kab. Pesibar	1. DISKOPUKMDAG Kab. Pesibar 2. DLH Kab. Pesibar 3. DT2KP Kab. Pesibar 4. DPMPTSP Kab. Pesibar 5. Bappelitbangda Kab. Pesibar 6. Kantor Pertanahan Kab. Pesibar 7. UPTD KPH Kab. Pesibar 8. BUMD/Perusahaan Kelapa Sawit di Kab. Pesibar 9. Pelaku Usaha	APBN/APBD
12	2	Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Palm Oil Mill Effluent (POME) sebagai energi terbarukan	12	2	1	Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Palm Oil Mill Effluent (POME) sebagai energi terbarukan	Jumlah laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan POME sebagai energi alternatif									
			12	2	2	Peningkatan pemanfaatan energi berbasis POME baik untuk keperluan sendiri maupun dijual ke perusahaan lain dalam bentuk energi listrik (Perusahaan Listrik Negara) dan Bio-CNG (Perusahaan Gas Negara)	Jumlah pemanfaatan energi berbasis POME baik untuk keperluan sendiri maupun dijual ke perusahaan lain dalam bentuk energi listrik (Perusahaan Listrik Negara) dan Bio-CNG (Perusahaan Gas Negara)									
13 Program Peremajaan Sawit Rakyat																
13	1	Pengembangan strategi <i>business to business</i> dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri, nira kelapa sawit sebagai bahan baku industri berbasis gula	13	1	1	Pengembangan strategi <i>business to business</i> dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri, nira kelapa sawit sebagai bahan baku industri berbasis gula	Jumlah dokumen strategi <i>business to business</i> dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri, dan nira kelapa sawit sebagai bahan baku industri berbasis gula							DKPP Kab. Pesibar	1. DLH Kab. Pesibar 2. DT2KP Kab. Pesibar 3. DPMPTSP Kab. Pesibar 4. Bappelitbangda Kab. Pesibar 5. Kantor Pertanahan Kab. Pesibar 6. UPTD KPH Kab. Pesibar 7. BUMD/Perusahaan Kelapa Sawit di Kab. Pesibar 8. Pelaku Usaha	APBN/APBD

14 Program Pengembangan Integrasi Sawit Sapi																
14	1	Peningkatan integrasi perkebunan kelapa sawit dan peternakan	14	1	1	Peningkatan jumlah perusahaan yang melakukan integrasi perkebunan kelapa sawit dan peternakan	Jumlah perusahaan yang mengintegrasikan perkebunan kelapa sawit dan peternakan							DKPP Kab. Pesibar	1. DLH Kab. Pesibar 2. DT2KP Kab. Pesibar 3. DPMPSTSP Kab. Pesibar 4. Bappelitbangda Kab. Pesibar 5. Kantor Pertanahan Kab. Pesibar 6. UPTD KPH Kab. Pesibar 7. BUMD/Perusahaan Kelapa Sawit di Kab. Pesibar 8. Pelaku Usaha	APBN/APBD
14	2	Pengembangan konsep <i>Green Industry</i> dari limbah kelapa sawit sebagai integrasi sawit sapi	14	2	1	Pengembangan konsep <i>Green Industry</i> melalui pembangunan pabrik pakan mini dari limbah kelapa sawit sebagai integrasi sawit sapi	Jumlah pabrik pakan mini dari limbah kelapa sawit									
			14	2	2	Pengembangan konsep <i>Green Industry</i> melalui pembangunan pabrik pupuk organik dari limbah ternak sapi sebagai integrasi sawit sapi	Jumlah pabrik pupuk organik dari limbah ternak sapi									
D. TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN SENGKETA																
15 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (Kode Nomenklatur 1 03 12)																
15	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Pesisir Barat	15	1	1	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	Jumlah dokumen penyelesaian sengketa penatan ruang							Kantor Pertanahan Kab. Pesibar	1. Dinas Perkebunan 2. Dinas LHK 3. Kesbangpol 4. Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/Kota 5. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota	APBN/APBD
16 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan (Kode Nomenklatur 2 10 04)																
16	1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan di Kabupaten Pesisir Barat	16	1	1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan di Kabupaten Pesisir Barat	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara di Kabupaten Pesisir Barat							Kantor Pertanahan Kab. Pesibar	1. DKPP Kab. Pesibar 2. DLH Kab. Pesibar 3. Badan Kesbangpol Kab. Pesibar	APBN/APBD
			16	1	2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan di Kabupaten Pesisir Barat	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan di Kabupaten Pesisir Barat									
			16	1	3	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Pesisir Barat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA di Kabupaten Pesisir Barat									
			16	1	4	Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Pesisir Barat	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten Pesisir Barat									
17 Program Penetapan Tanah Ulayat (Kode Nomenklatur 2 10 07)																
17	1	Penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kabupaten Pesisir Barat	17	1	1	Inventarisasi sengketa tanah ulayat di Kabupaten Pesisir Barat	Laporan inventarisasi data sengketa tanah ulayat di Kabupaten Pesisir Barat							Kantor Pertanahan Kab. Pesibar	1. DKPP Kab. Pesibar 2. DLH Kab. Pesibar 3. Badan Kesbangpol Kab. Pesibar	APBN/APBD
			17	1	2	Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kabupaten Pesisir Barat	Jumlah Berita Acara Mediasi sengketa tanah ulayat di Kabupaten Pesisir Barat									
			17	1	3	Monitoring dan Evaluasi Hasil Fasilitasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kabupaten Pesisir Barat	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Hasil Fasilitasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kabupaten Pesisir Barat									
17	2	Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas hutan dan tanah serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya	17	2	1	Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas bidang tanah adat/Ulayat	Jumlah Penetapan Hak atas tanah ulayat								1. DKPP Kab. Pesibar 2. DLH Kab. Pesibar 3. Badan Kesbangpol Kab. Pesibar	APBN/APBD

17	3	Pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir	17	3	1	Penyusunan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir	Jumlah Kebijakan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir Yang Ditetapkan									1. DKPP Kab. Pesibar 2. DLH Kab. Pesibar 3. Badan Kesbangpol Kab. Pesibar	APBN/APBD
17	4	Penyelesaian tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak di Kabupaten Pesisir Barat	17	4	1	Inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak lintas daerah kecamatan	Laporan inventarisasi data masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak lintas daerah kecamatan									1. DKPP Kab. Pesibar 2. DLH Kab. Pesibar 3. Badan Kesbangpol Kab. Pesibar	
			17	4	2	Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak di Kabupaten Pesisir Barat	Jumlah Berita Acara Mediasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak di Kabupaten Pesisir Barat								1. DKPP Kab. Pesibar 2. DLH Kab. Pesibar 3. Badan Kesbangpol Kab. Pesibar		
18 Program Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan (Kode Nomenklatur 2 10 17)																	
18	1	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	18	1	1	Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan di Kabupaten Pesisir Barat	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara di Kabupaten Pesisir Barat							Kantor Pertanahan Kab. Pesibar		1. DKPP Kab. Pesibar 2. DLH Kab. Pesibar 3. Badan Kesbangpol Kab. Pesibar	APBN/APBD
			18	1	2	Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan di Kabupaten Pesisir Barat	Berita Acara Hasil Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di Kabupaten Pesisir Barat										
			18	1	3	Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Pesisir Barat	Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten Pesisir Barat										
19 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (Kode Nomenklatur 2 11 10)																	
19	1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten Pesisir Barat	19	1	1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten Pesisir Barat	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Kabupaten Pesisir Barat							DLH Kab. Pesibar		1. DKPP Kab. Pesibar 2. Kantor Pertanahan Kab. Pesibar 3. Badan Kesbangpol Kab. Pesibar	APBN/APBD
20 Program Perencanaan Hutan (Kode Nomenklatur 3 28 02)																	
20	1	Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan Hutan dan dilaksanakan oleh KPH	20	1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan Hutan dan dilaksanakan oleh KPH	Jumlah Dokumen Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan Hutan dan dilaksanakan oleh KPH							Dinas Kehutanan Provinsi Lampung		1. DKPP Kab. Pesibar 2. Kantor Pertanahan Kab. Pesibar 3. Badan Kesbangpol Kab. Pesibar 4. KPH Kab. Pesibar (Dishut Provinsi Lampung) 5. Kemen LHK 6. DLH Kab. Pesibar	APBN/APBD
20	2	Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten	20	2	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten, KPH Lindung dan KPH Produksi	Jumlah dokumen Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten, KPH Lindung dan KPH Produksi										
20	3	Penyelesaian ketidaksesuaian izin atau konsesi dalam keterlanjuran yang telah dikuasai dan dimanfaatkan untuk perkebunan sawit di dalam kawasan hutan	20	3	1	Koordinasi dan inventarisasi penyelesaian ketidaksesuaian izin atau konsesi dalam keterlanjuran yang telah dikuasai dan dimanfaatkan untuk perkebunan sawit di dalam kawasan hutan	Jumlah koordinasi dan inventarisasi penyelesaian ketidaksesuaian izin atau konsesi dalam keterlanjuran yang telah dikuasai dan dimanfaatkan untuk perkebunan sawit di dalam kawasan hutan										
			20	3	2	Penetapan penyelesaian ketidaksesuaian izin atau konsesi dalam keterlanjuran yang telah dikuasai dan dimanfaatkan untuk perkebunan sawit di dalam kawasan hutan	Jumlah penyelesaian ketidaksesuaian izin atau konsesi dalam keterlanjuran yang telah dikuasai dan dimanfaatkan untuk perkebunan sawit di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan										

21 Program Perizinan Usaha Pertanian (Kode Nomenklatur 3 27 06)															
21	1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya di Kabupaten Pesisir Barat	21	1	1	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Kabupaten Pesisir Barat	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Kabupaten Pesisir Barat						DKPP Kab. Pesibar	1. DPMPTSP Kab. Pesibar 2. Bappelitbangda Kab. Pesibar	APBN/APBD
22 Program Pengawasan Ketenagakerjaan (Kode Nomenklatur 2 07 06)															
22	1	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	22	1	1	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)						DT2KP Kab. Pesibar	1. DKPP Kab. Pesibar 2. Perusahaan Kelapa Sawit di Kab. Pesibar	APBN/APBD
			22	1	2	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3								
23 Program Hubungan Industrial (Kode Nomenklatur 2 07 05)															
23	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi di Kabupaten Pesisir Barat	23	1	1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek						DT2KP Kab. Pesibar	1. DKPP Kab. Pesibar 2. Diskominfotiks Kab. Pesibar 3. Perusahaan Kelapa Sawit di Kab. Pesibar 4. Pelaku Usaha	APBN/APBD
23	2	Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK)	23	2	1	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan						DT2KP Kab. Pesibar	1. DKPP Kab. Pesibar 2. Bappelitbangda Kab. Pesibar 3. Perusahaan Kelapa Sawit di Kab. Pesibar 4. Pelaku Usaha	APBN/APBD
24 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Dan Pengembangan (Kode Nomenklatur 7 03 02)															
24	1	Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit	24	1	1	Pelatihan keterampilan dan ketenagakerjaan bagi petani sawit	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pelatihan keterampilan dan ketenagakerjaan bagi petani sawit						DT2KP Kab. Pesibar	1. DKPP Kab. Pesibar 2. Bappelitbangda Kab. Pesibar 3. BPJS Ketenagakerjaan Kab. Pesibar 4. Pelaku Usaha	APBN/APBD
			24	1	2	Registrasi petani kelapa sawit yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah petani kelapa sawit yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan								
			24	1	3	Registrasi penyuluh swadaya kelapa sawit yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah penyuluh swadaya kelapa sawit yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan								
25 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (Kode Nomenklatur 4 02 02)															
25	1	Pembentukan Perda dan Peraturan	25	1	1	Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah penetapan tanah ulayat di Kabupaten Pesisir Barat	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah						Setda Kab. Pesisir Barat	1. DPRD Kab. Pesibar 2. Badan Kesbangpol Kab. Pesibar 3. DKPP Kab. Pesibar 4. Bappelitbangda Kab. Pesibar 5. Perusahaan Kelapa Sawit di Kab. Pesibar 6. Pelaku Usaha	APBN/APBD
			25	1	2	Pembahasan rancangan perda	Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan perda								
			25	1	3	Penyelenggaraan kajian perundang-undangan	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan								
			25	1	4	Fasilitasi penyusunan naskah akademik	Jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang difasilitasi								
			25	1	5	Sosialisasi peraturan daerah yang dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan daerah yang dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah								

E. DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI INDONESIA SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO) DAN PENINGKATAN AKSES PASAR PRODUK KELAPA SAWIT																	
26	Program Perizinan Usaha Pertanian (Kode Nomenklatur 3 27 06)																
26	1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya di Kabupaten Pesisir Barat	26	1	1	Penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian di Kabupaten Pesisir Barat	Jumlah penilaian kelayakan dan Pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian di Kabupaten Pesisir Barat						DKPP Kab. Pesibar	1. DPMPTSP Kab. Pesibar 2. DISKOPUKMDAG Kab. Pesibar 3. Lembaga sertifikasi 4. Perusahaan Kelapa Sawit di Kab. Pesibar 5. Pelaku Usaha	APBN/APBD		
			26	1	2	Pembinaan dan pengawasan penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah laporan izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi										
27 Program Penyuluhan Pertanian (Kode Nomenklatur 3 27 07)																	
27	1	Pembinaan usaha perkebunan berstandar ISPO	27	1	1	Sosialisai kepatuhan pada peraturan perundangan dan penerapan praktik perkebunan yang baik	Jumlah sosialisasi perundangan dan penerapan praktik perkebunan yang baik						DKPP Kab. Pesibar			1. BDPKPS 2. Badan SNI 3. Diskominfotiksan Kab. Pesibar 4. DPMPTSP Kab. Pesibar 5. DISKOPUKMDAG Kab. Pesibar 6. Bappelitbangda Kab. Pesibar 7. DT2KP Kab. Pesibar 8. Perusahaan Kelapa Sawit di Kab. Pesibar 9. Pelaku Usaha	APBN/APBD
			27	1	2	Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian bestandar ISPO	Terselenggarakan Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian berstandar ISPO										
			27	1	3	Fasilitasi sertifikasi ISPO	Jumlah fasilitasi sertifikasi ISPO										
			27	1	4	Sosialisasi usaha perkebunan Berstandar ISPO	Jumlah sosialisasi perkebunan berstandar ISPO										
			27	1	5	Pelatihan ISPO bagi pekebun	Jumlah pelatihan ISPO bagi pekebunan										
27	2	Penyusunan peta jalan strategi komunikasi di tingkat kabupaten	27	2	1	Penyusunan peta jalan strategi komunikasi di tingkat kabupaten	Tersedianya peta jalan strategi komunikasi di tingkat kabupaten						DKPP Kab. Pesibar	1. Diskominfotiksan Kab. Pesibar 2. DPMPTSP Kab. Pesibar 3. DISKOPUKMDAG Kab. Pesibar 4. Bappelitbangda Kab. Pesibar 5. DT2KP Kab. Pesibar 6. Perusahaan Kelapa Sawit di Kab. Pesibar 7. Pelaku Usaha	APBN/APBD		
27	3	Peningkatan frekuensi sosialisasi sistem sertifikasi ISPO	27	3	1	Peningkatan frekuensi sosialisasi sistem sertifikasi ISPO	Jumlah para pihak yang memahami pentingnya sertifikasi ISPO						DKPP Kab. Pesibar	1. Badan SNI 2. Diskominfotiksan Kab. Pesibar 3. DPMPTSP Kab. Pesibar 4. DISKOPUKMDAG Kab. Pesibar 5. Bappelitbangda Kab. Pesibar 6. DT2KP Kab. Pesibar 7. Perusahaan Kelapa Sawit di Kab. Pesibar 8. Pelaku Usaha	APBN/APBD		
			27	3	2	Peningkatan jumlah perusahaan dan pekebun yang mendapatkan sertifikat ISPO	Jumlah perusahaan dan pekebun yang mendapatkan sertifikat ISPO										
27	4	Pendampingan sertifikasi ISPO bagi pelaku usaha perkebunan sawit	27	4	1	Pendampingan sertifikasi ISPO bagi pelaku usaha perkebunan sawit	Jumlah pekebun yang memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikasi ISPO										
27	5	Peningkatan jumlah dan kapasitas Petugas Penilai Usaha Perkebunan (PUP) dan dana Pemerintah Daerah untuk proses penilaian kebun sebagai prasyarat mendapatkan sertifikat ISPO	27	5	1	Peningkatan jumlah dan kapasitas Petugas Penilai Usaha Perkebunan (PUP) dan dana Pemerintah Daerah untuk proses penilaian kebun sebagai prasyarat mendapatkan sertifikat ISPO	Jumlah kapasitas PUP dan dana di daerah untuk kegiatan pelaksanaan penilaian usaha perkebunan										
			27	5	2	Peningkatan jumlah kebun yang sudah mendapatkan penilaian kelas kebun	Jumlah kebun yang sudah mendapatkan penilaian kelas kebun										
27	6	Penyusunan panduan kemitraan antara perusahaan dan pekebun untuk memperoleh sertifikat ISPO	27	6	1	Penyusunan panduan kemitraan antara perusahaan dan pekebun untuk memperoleh sertifikat ISPO	Tersusunya panduan kemitraan antara perusahaan dan pekebun untuk mendapatkan sertifikat ISPO										
27	7	Penyelenggaraan pelatihan ISPO untuk petugas di kabupaten	27	7	1	Penyelenggaraan pelatihan ISPO untuk petugas di kabupaten	Jumlah petugas pendamping untuk sertifikasi ISPO										
27	8	Pembentukan kelompok kerja sebagai wadah infomasi dan konsultasi ISPO	27	8	1	Pembentukan kelompok kerja sebagai wadah infomasi dan konsultasi ISPO	Jumlah kelompok kerja sebagai wadah informasi dan konsultasi ISPO										

28 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri															
28	1	Hilirisasi produk perkebunan kelapa sawit berkelanjutan (Kode Nomenklatur 2 17 06 2.01 0005)	28	1	1	Diversifikasi produk turunan kelapa sawit	Jumlah produk diversifikasi turunan kelapa sawit						DISKOPUKMDAG Kab. Pesibar	1. Badan SNI 2. DKPP Kab. Pesibar 3. Diskominfoitksan Kab. Pesibar 4. DPMPSTSP Kab. Pesibar 5. Bappelitbangda Kab. Pesibar 6. DT2KP Kab. Pesibar 7. Perusahaan Kelapa Sawit di Kab. Pesibar 8. Pelaku Usaha	APBN/APBD

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 PIt.KEP. DA BAGIAN HUKUM
 KABUPATEN PESISIR BARAT
 EEMA KHATUNIA SABDA, S.H., M.H.
 NIP. 19850428 201403 2 002

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN